

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penominasian kandidat (*candidacy*) pada rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan menggunakan pola/model inklusif karena semua pemilih dapat menjadi kandidat calon bupati dari PDI Perjuangan. Yang hanya dibatasi oleh regulasi yang ditetapkan negara, yaitu berkas dan persyaratan yang disyaratkan oleh KPU untuk menjadi kepala daerah. Lebih lanjut dalam pengaplikasian pola rekrutmen politik PDI Perjuangan memberikan porsi yang sama kepada kandidat calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan. Artinya kandidat calon yang telah memenuhi persyaratan semuanya dapat mengikuti tes selanjutnya yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan. Dan tes tersebut dilaksanakan secara bersamaan baik orang PDI Perjuangan maupun orang dari luar PDI Perjuangan. Sehingga proses rekrutmen kandidat calon bupati dalam PDI Perjuangan tidak ada perbedaan antara kandidat calon dari PDI Perjuangan maupun kandidat dari luar PDI Perjuangan artinya seleksi calon bupati dalam PDI Perjuangan ini dilakukan secara terbuka dan transparan.
2. Penentuan penyeleksi kandidat (*selectorate*) yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015 menggunakan model eksklusif. Selektoral bersifat eksklusif dimana

kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. Atau lebih spesifiknya disebut dengan sistem pola informal-interlokal, karena mulai dari prosedur atau mekanisme untuk melakukan rekrutmen ditentukan pimpinan partai (DPP). Namun mereka juga membentuk panitia penjaringan dan penyaringan yang secara khusus diberikan “sedikit” kewenangan untuk melakukan penyaringan dan penjaringan serta seleksi administratif terkait berkas yang masuk dari kandidat yang mendaftar kandidat calon bupati di PDI Perjuangan. Dibentuknya panitia penjaringan ini adalah berfungsi untuk menekan dan meminimalisir indikasi adanya dominasi yang dilakukan pemimpin partai. Melakukan pembatasan kewenangan atau tidak menyertakan pemilih sebagai bagian dari pihak yang menyeleksi calon kandidat.

3. Penentuan dimana kandidat calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota yang dilakukan oleh PDI Perjuangan diseleksi adalah menggunakan pola atau model sentralistik. Artinya seleksi calon kepala daerah terfokus/terpusat pada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Memang ada keterlibatan daerah dalam pelaksanaan seleksi, namun keterlibatan daerah hanya sebatas melakukan penjaringan dan penyaringan serta melakukan seleksi administratif berkas-berkas calon bupati yang ingin mendaftar melalui PDI Perjuangan. Jadi daerah hanya mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh pusat partai. Sehingga kewenangan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

4. Prosedur pemutusan kandidat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kandidat yang terpilih adalah menggunakan pola kandidat dengan prinsip seleksi yang lebih demokratis. Hal ini dibuktikan dengan semua kandidat calon mengikuti seluruh proses yang ditentukan oleh PDI Perjuangan. Semua mekanisme seleksi memang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat namun dalam proses seleksi kandidat dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Dalam penentuan siapa yang mendapatkan rekomendasi juga berdasarkan hasil dari proses seleksi mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap akhir. Untuk menentukan siapa yang mendapatkan rekomendasi juga melalui rapat pada internal DPP PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan mengedepankan musyawarah untuk menentukan segala macam keputusan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang melatarbelakangi PDI Perjuangan memilih Joko Sutopo sebagai calon bupati Wonogiri adalah memang karena dalam proses seleksi calon bupati dari awal hingga akhir penilaian Joko Sutopo telah mengikuti semua mekanisme yang telah ditentukan oleh PDI Perjuangan. Dan dari proses atau mekanisme tersebut dinilai Joko Sutopo adalah yang layak menjadi kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan. Karena beliau memiliki beberapa keunggulan yang memang tidak dimiliki kandidat calon yang lain. Beberapa keunggulan yang dimiliki Joko Sutopo diantaranya beliau adalah ketua partai (Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri). Yang dinilai loyalitas dan konsistensinya terhadap partai akan lebih tinggi dibandingkan kandidat yang lain. Sehingga memang wajar

jika rekomendasi itu turun kepada Joko Sutopo bukan kepada Dinar Rahmanto yang merupakan kandidat petahana/*incumbent*. Selain itu ada keuntungan yang diperoleh partai jika Joko Sutopo terpilih menjadi bupati Wonogiri. Keuntungan tersebut adalah akan tercapainya tujuan umum dan tujuan khusus yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan tujuan tersebut diharapkan masyarakat akan mendapatkan kepuasan terhadap kinerja seorang kader partai dan PDI Perjuangan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat Wonogiri.

B. Saran

Dalam berpolitik pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan sebagai penghambat dalam implementasinya, maka peneliti memberikan masukan atau pendapat sebagai saran untuk DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri :

1. Dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan disarankan untuk melakukan sosialisasi/pengumuman kepada masyarakat secara luas bahwa PDI Perjuangan membuka pendaftaran untuk pencalonan bupati dan wakil bupati, sehingga masyarakat umum khususnya di kabupaten Wonogiri mengetahui bahwa PDI Perjuangan membuka pendaftaran untuk kandidat calon bupati. Dengan begitu peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat lebih mengena, dan tentunya akan lebih banyak yang berminat untuk mendaftar menjadi kandidat calon bupati atau wakil bupati. Semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat, dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cenderung longgar.

2. Lebih transparan lagi dalam melakukan proses rekrutmen politik, mulai dari proses penjangkaran atau pendaftaran hingga proses akhir. Supaya masyarakat mengetahui proses rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan. Hal ini juga menjadi pendidikan politik untuk masyarakat secara luas tentang proses rekrutmen politik.
3. PDI Perjuangan harus terus memperbanyak dan membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh bupati dari PDI Perjuangan pro terhadap rakyat sehingga legitimasi atau kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan semakin tinggi.
4. Pada saat melakukan pelebagaan panitia rekrutmen politik perlu melibatkan orang di luar partai, hal ini perlu dilakukan agar etika netralitas dalam melakukan rekrutmen politik dapat senantiasa terjaga.